

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam memajukan berbagai sektor pembangunan di wilayah tersebut. Sebagai salah satu provinsi yang strategis secara geografis, dengan perbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga dan keberadaan wilayah daratan dan kepulauan, Provinsi Bengkulu memiliki kebutuhan yang mendesak untuk membangun sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Dalam konteks ini, perusahaan PT. AVIKA UTAMA, yang berkantor di Kota Arga Makmur, bekerja sama dengan konsultan pengawas PT. CREMONA PRATAMA TOTAL ENGINEERING, memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan industri di Indonesia, terutama dalam membangun fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan.

Tujuan proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu, adalah merealisasikan pembangunan Jalan Lintas Nasional. Proyek ini bertujuan untuk memberikan pelayanan transportasi darat yang optimal melalui pencegahan, perawatan, dan perbaikan jalan yang diperlukan guna mempertahankan kondisi jalan agar dapat berfungsi secara optimal melayani lalu lintas.

Tujuan preservasi yang dilakukan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan agar dapat memberikan pelayanan jasa transportasi yang optimal, meningkatkan kenyamanan mobilitas antar wilayah dan antar provinsi, menurunkan biaya transportasi, serta meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas perdagangan luar kota. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan dan kemajuan wilayah tersebut.

1.2 Tujuan Proyek

1. Merealisasikan Jalan Lintas Nasional: Proyek ini bertujuan untuk merealisasikan pembangunan Jalan Lintas Nasional sebagai prasarana transportasi darat yang menggunakan sumber dana anggaran APBN Tahun Anggaran 2023.
2. Pencegahan, Perawatan, dan Perbaikan Jalan: Melakukan kegiatan penanganan jalan berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas.
3. Pemenuhan Tujuan Preservasi: Melalui penanganan jalan yang efektif, tujuan preservasi jalan dapat terpenuhi dengan menjaga kondisi jalan agar memberikan pelayanan jasa transportasi yang optimal.
4. Peningkatan Kenyamanan Mobilitas: Proyek ini juga bertujuan untuk memberikan kenyamanan mobilitas bagi pengguna jalan, baik antar wilayah maupun antar provinsi.
5. Pengurangan Biaya Transportasi: Dengan mempertahankan kondisi jalan yang baik, proyek ini diharapkan dapat membantu menurunkan biaya transportasi bagi pengguna jalan.
6. Meningkatkan Iklim Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Dengan adanya infrastruktur jalan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas perdagangan luar kota yang lebih lancar dan efisien.

1.3 Ruang Lingkup Pekerjaan

PT. AVIKA UTAMA adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi, termasuk pembangunan jalan. Selain itu, perusahaan ini juga aktif dalam perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Pemerintah dan perusahaan swasta menjadi mitra kerja utama PT. AVIKA UTAMA, yang memberikan kontribusi besar dalam menjaga kesinambungan eksistensi perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Kontribusi ini tercermin dalam kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Departemen Teknis) dan Pemerintah Daerah melalui dinas terkait kepada PT. AVIKA UTAMA untuk menggarap kegiatan atau program yang memiliki signifikansi, dengan menggunakan jasa konsultasi yang disediakan oleh perusahaan ini.

1.4 Ruang Lingkup Pekerjaan Utama

1. Pengadaan Gambar dan Rencana Kerja: Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan kontrak. Pekerjaan permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
2. Evaluasi dan Persetujuan Rencana Mutu: Bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi.
3. Pemberian Izin Tahapan Pekerjaan: Memberikan izin untuk memulai setiap tahapan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.
4. Pemeriksaan dan Persetujuan Kemajuan Pekerjaan: Memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan kontrak.
5. Pemeriksaan dan Penilaian Mutu dan Keselamatan Konstruksi: Bertanggung jawab untuk memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan.

6. Penghentian Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Persyaratan: Berhak menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan kontrak.
7. Tanggung Jawab Terhadap Hasil Pekerjaan: Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
8. Pelaporan Periodik: Memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

1.5 Struktur Organisasi Perusahaan

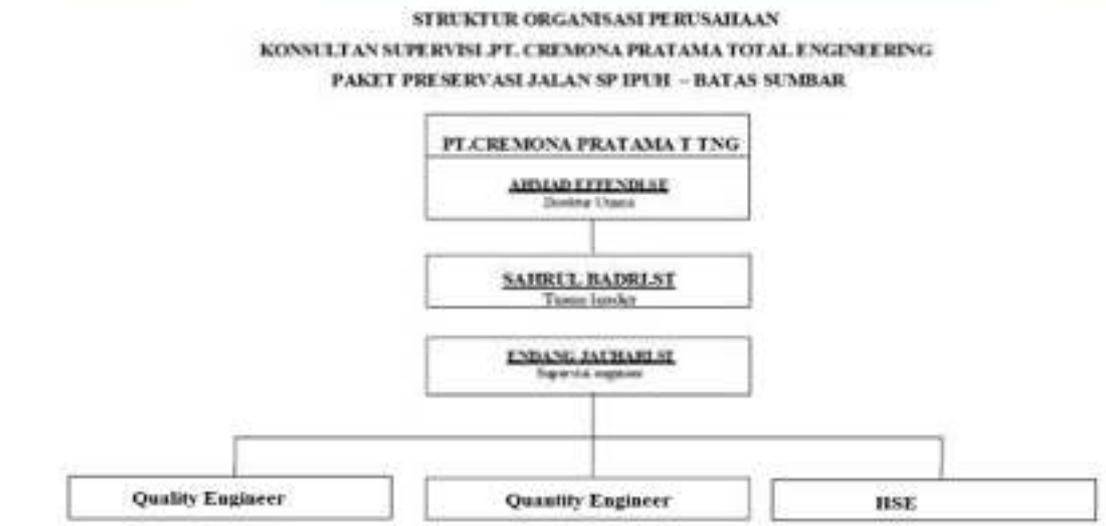
Dalam menjalankan proyek konstruksi atau industri, kejelasan dalam struktur organisasi perusahaan atau industri menjadi hal yang sangat penting. Hal ini membantu dalam menentukan jalur instruksi dan koordinasi antara semua pihak terkait, mulai dari tim Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana Teknis, hingga Pengawasan Teknis.

1.6 Struktur Organisasi Proyek

1. Pejabat Pembuat Komitmen: Merupakan individu atau tim yang bertanggung jawab atas pembuatan keputusan terkait komitmen proyek. Mereka memiliki kewenangan untuk menetapkan arah dan strategi proyek serta mengambil keputusan terkait perencanaan, anggaran, dan sumber daya proyek.
2. Pelaksana Teknis: Merupakan tim atau individu yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan teknis proyek. Mereka terlibat dalam proses pengimplementasian rencana dan strategi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Tugas mereka meliputi koordinasi operasional, manajemen sumber daya manusia, dan pengawasan langsung terhadap pekerjaan lapangan.
3. Pengawasan Teknis: Merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan teknis terhadap proyek. Mereka memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan,

serta melakukan evaluasi terhadap kualitas dan kemajuan pekerjaan. Pengawasan teknis ini mencakup aspek-aspek seperti kesesuaian dengan gambar dan spesifikasi, penggunaan material yang tepat, dan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keselamatan.

Dengan adanya struktur organisasi proyek yang jelas dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keselamatan dalam pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi risiko terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perusahaan